

**PERUBAHAN ELEKTABILITAS
PARTAI PESERTA PEMILU DI YOGYAKARTA TAHUN 1971-1999**

YULI ROHMAWAI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
e-Mail: yulirohmawati.cancer@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pemilu sebagai salah satu wujud dari sebuah negara yang demokrasi mulai dilaksanakan di Indonesia. Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang ada di Indonesia tidak lepas dari pelaksanaan sistem demokrasi dengan melaksanakan Pemilu setiap lima tahun sekali. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi basis kekuatan Golkar pada pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru. Kemenangan Golkar di Yogyakarta sudah terjadi sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1971-1997. Namun kondisi berbeda terjadi pada Golkar ketika pelaksanaan Pemilu tahun 1999, yang mana posisi Golkar tergeser oleh PDI. Adanya perubahan perolehan suara yang terjadi antara PDI dan Golkar pada Pemilu tahun 1999 menunjukkan adanya perubahan elektabilitas yang terjadi antara PDI dan Golkar.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Pemilu di Indonesia tahun 1971-1999?, Bagaimana pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta pada tahun 1971-1999?, Mengapa terjadi perubahan elektabilitas partai peserta Pemilu di Yogyakarta pada tahun 1971-1999?. Penelitian ini menggunakan metode metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip tentang pemilu, Undang – undang tentang Pemilu serta koran yang membahas tentang Pemilu di Yogyakarta antara tahun 1971-1999.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh tiga peserta yaitu PPP, PDI, dan Golkar, pelaksanaan Pemilu selalu diawali dengan aksi kampanye dari berbagai partai peserta Pemilu. Pada Pemilu tahun 1999 peserta Pemilu mencapai 48 partai. Pelaksanaan Pemilu tahun 1971-1999 dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh partai peserta Pemilu ketika melaksanakan kampanye. Kondisi yang sama juga terjadi di Yogyakarta dimana jumlah peserta Pemilu hanya dibatasi tiga peserta saja. Para peserta Pemilu menyampaikan visi dan misi partai pada pelaksanaan kampanye. Aksi kampanye yang dilakukan partai peserta Pemilu di Yogyakarta menyebabkan berbagai pelanggaran, mulai dari bentrok fisik antar pendukung partai, pelanggaran lalu lintas, hingga pengrusakan kantor DPC salah satu partai di Yogyakarta. Pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan tertentu. Hasil Pemilu masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar, namun kemenangan Golkar tidak berlangsung lama. Pada Pemilu tahun 1999 PDI mampu memenangkan perolehan suara di Yogyakarta. Adanya perubahan perolehan suara antara PDI dan Golkar menunjukkan terjadinya perubahan elektabilitas pada kedua partai. Perubahan tersebut terjadi akibat kegagalan Pemerintahan Orde Baru dan dihapuskannya segala kebijakan yang tidak adil terhadap partai peserta Pemilu.

Kata Kunci: *Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemilu Orde Baru dan Reformasi, Perubahan elektabilitas partai*

Abstract

Election as a manifestation of a country whose democracy was implemented in Indonesia. Special Region of Yogyakarta in Indonesia can not be separated from the implementation of a democratic system by Elections every five years. Yogyakarta is one of the strongholds of Golkar in the election of the New Order. Golkar victory in Yogyakarta occurred since elections in 1971-1997. Different conditions on Golkar occur in the general election of 1999, when the position of Golkar displaced by PDI. A change in the vote that occurred between PDI and Golkar in the 1999 election showed changes elektability between PDI and Golkar.

Issues examined in this study are: How the election in Indonesia in 1971-1999?, How the election in Yogyakarta in 1971-1999?, Why the change of the party in the election electability Yogyakarta in 1971-1999?. Research using the methodology of historical research which consists of heuristics, the criticism, interpretation and

historiography. Primary sources were used in this study is an archive of the election, electoral legislation and electoral papers that discuss in Yogyakarta between the years 1971-1999.

The results of this study states that the election in Indonesia during the New Order was only followed by three participants of PPP, PDI and Golkar, election campaign always starts with various parties. In the 1999 election the party electoral participants reached 48. Election in 1971-1999 can be implemented by the government but mistakes are still made by the party campaign. The same conditions occurred in Yogyakarta number of electoral participants is limited to three participants.. Participants Election convey vision and mission of the Party in the campaign. Campaign in Yogyakarta cause offense, physical clashes between party supporters, traffic violations, until the destruction one of the office party in Yogyakarta. Election in Yogyakarta executed well, but some people do not exercise their voting rights. Election results during the New Order won by Golkar, but Golkar victory did not last long. In the 1999 election PDI is able to win the vote in Yogyakarta. The change of the vote between PDI and Golkar shows the change electability on both parties. The changes result from failure of the New Order regime and the abolition of all the unfair policies of the parties participating in the elections.

Keywords: Yogyakarta Special Region, New Order Election Reform and Change party electability.

PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan salah satu Daerah Istimewa yang ada di Negara Indonesia. Penetapan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa bukan tanpa alasan. Dilihat dari sejarahnya Provinsi Yogyakarta mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemerdekaan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Meskipun sudah menjadi salah satu daerah istimewa yang ada di Indonesia, namun pemerintahan di Yogyakarta tetap menjalankan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Soekarno, dan dilanjutkan hingga pemerintahan saat ini setiap lima tahun sekali.

Pemilu pertama yang pernah dilaksanakan di daerah Yogyakarta yaitu Pemilu lokal pada tahun 1948. Pemilu lokal yang diadakan di kota Yogyakarta disambut positif oleh rakyat Yogyakarta. Hal itu ditunjukkan pada pemilihan anggota DPR daerah Istimewa Yogyakarta yang diadakan pada 16 Juli 1951 yang berakhir dengan hasil yang memuaskan meskipun baru pertama kali dilakukan di negara Indonesia.¹ Pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta dilanjutkan pada tahun 1955 yaitu pada masa Orde Lama, dan Pemilu tahun 1971-1997 masa Orde Baru hingga masa Reformasi dan sampai saat ini. Fungsi utama pelaksanaan pemilu adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memilih para wakil untuk duduk di kursi penguasa. Patisipasi masyarakat Yogyakarta mulai ditunjukkan ketika pemilu lokal tahun 1951-1957.

Sejak Pemilu pertama dimasa Orde Baru masyarakat Yogyakarta dan pemimpinnya Sri Sultan Hamengku Buwana IX sudah menunjukkan dukungannya terhadap Golkar yang merupakan partai pemerintah pada saat itu. Hal itu terbukti dari jumlah suara Golkar di Yogyakarta yang cukup tinggi mulai dari pelaksanaan Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, hingga

1987 jumlah suara Golkar tidak mampu tertandingi oleh partai politik lain peserta Pemilu. Kemenangan Golkar di Yogyakarta berlanjut hingga kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwana X yaitu pada Pemilu tahun 1992 dan 1997.

Pada pemilu tahun 1999 kemenangan Pemilu tidak lagi didominasi oleh suara Golkar. Hilangnya dominasi suara Golkar di Yogyakarta pada Pemilu tahun 1999 menunjukkan kurangnya dukungan rakyat Yogyakarta terhadap Golkar. Kondisi berbeda terjadi pada PDI yang mana pada Pemilu tahun 1999 mampu menjadikan partainya sebagai peraih suara tertinggi di Yogyakarta. Adanya perubahan jumlah suara yang terjadi pada PDI di Yogyakarta setelah sekian lama menjadi partai dengan suara minoritas di masa Orde Baru menjadikan PDI sebagai satu kekuatan baru yang muncul pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Kemenangan PDI dan kekalahan Golkar di Yogyakarta menunjukkan adanya perubahan elektabilitas yang terjadi diantara kedua partai pada Pemilu tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilu di Indonesia tahun 1971-1999?
2. Bagaimana pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta tahun 1971-1999?
3. Mengapa terjadi perubahan elektabilitas partai peserta Pemilu di Yogyakarta pada tahun 1971-1999?

¹ Ahmad Nashih Lutfi dkk, *Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2009), hlm 119

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.² Tahap pertama adalah penelusuran sumber atau heuristik yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber sebanyak – banyaknya baik sumber utama (primer) maupun sumber pendukung (skunder).

Sumber utama (primer) didapatkan dari arsip dan koran serta majalah seaman yang membahas tentang pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta. Sumber utama yang berupa arsip terdiri dari, Jadwal kampanye di Yogyakarta pada Pemilu 1992, catatan Peristiwa atau kejadian pada Pemilu 1992, daftar Pegawai Negeri yang duduk sebagai panitia Pemilu tahun 1992, serta Undang – undang No. 15 tahun 1969 dan Undang – undang No. 3 Tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu nasional. Sumber utama koran dan majalah yakni, *Kedaulatan Rakyat* tahun 1971-1999, *Jawa Pos* tahun 1992-1999, *Bernas* tahun 1998, *Merdeka* tahun 1982 dan *Tempo* tahun 1992. Sumber skunder diperoleh dari buku – buku yang terkait dengan topic yang dibahas.

Pada tahap kedua adalah kritik, yaitu peneliti menguji sumber-sumber yang telah didapatkan menjadi data dan fakta dengan mengkategorikan berdasarkan pokok bahasan masing – masing. Peneliti harus menghubungkan keterkaitan antar data yang telah didapatkan sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta. Fakta – fakta yang telah didapatkan harus dihubungkan lagi dengan fakta yang lain dari sumber yang diperoleh. Sumber arsip, undang – undang dan Koran tahun 1971-1999 yang diperoleh dicocokkan dengan buku – buku yang membahas tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia dan di Yogyakarta pada tahun 1971-1999.

Pada tahap ketiga penulis melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber dengan cara mencari keterkaitan antar fakta yang telah diperoleh. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini peneliti menuliskan sebuah penelitian sejarah dengan judul “Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu Di Yogyakarta Pada Tahun 1971-1999”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Tahun 1971-1999

Pemilu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai negara demokratis. Pemilu juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan mewakili pikiran rakyat dalam pemerintahan. Karena pemilu merupakan hak asasi bagi warga negara, maka rakyat dapat menentukan sendiri para wakil rakyat melalui partai – partai dan golongan yang mewakili dalam pelaksanaan Pemilu.

Tujuan pelaksanaan Pemilu di Indonesia menurut Undang – undang Dasar 1945 yaitu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dikursi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat II. Pemilihan Umum tidak hanya memilih para wakil rakyat untuk duduk di lembaga pemerintahan saja, dan juga tidak memilih wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat.

Asas yang digunakan pada Pemilu masa Orde Baru dan Reformasi memiliki perbedaan. Pada Pemilu Masa Orde Baru menurut Undang – undang No. 16 Tahun 1969 asas yang digunakan adalah LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia).³ Pada Pemilu masa Reformasi asas yang digunakan menurut Undang – undang No. 3 Tahun 1999 adalah LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan adil).⁴ Walaupun terdapat perubahan asas, namun sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 1971-1999 tidak pernah berubah, yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada 3 Juli 1971. Peserta Pemilu pada tahun 1971 terdiri dari 9 Partai (PNI, Murba, NU, Parmusi, Perti, Perkindo, IPKI, Partai Katolik, PSII) dan 1 Golongan (Golongan Karya). Hasil Pemilu tahun 1971 memunculkan satu kekuatan baru yaitu Golongan Karya yang pada saat itu mampu memperoleh suara cukup tinggi yaitu 34.348,673 (62,8%). Perolehan suara yang cukup tinggi bagi Golkar berdampak pada perolehan kursi yang cukup dominan dalam parlemen yaitu mencapai 236 kursi.

Pemilu Orde Baru dilaksanakan kembali pada tahun 1977. Pada Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh tiga peserta. Sedikitnya jumlah peserta Pemilu tahun 1977 disebabkan karena adanya penyederhanaan jumlah partai yang dilakukan oleh pemerintah. Penyederhanaan jumlah partai dilakukan dengan menggabungkan partai – partai yang memiliki pandangan ideologi dan basis masa yang sama. Partai Peserta Pemilu terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). jumlah peserta Pemilu yang hanya terdiri dari dua partai dan satu golongan mampu bertahan hingga akhir pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru, yaitu tahun 1997.

Pembaharuan peraturan Pemilu kembali dilakukan oleh pemerintah menjelang Pemilu tahun 1987. Pembaharuan tersebut ialah, dengan menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal Bangsa Indonesia. Partai Politik dan Golongan Karya sebagai peserta Pemilu harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka, dengan menjabarkan program – program demi mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan ideology

² Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10

³ Undang – undang no. 15 Tahun 1969

⁴ Undang – undang No. 3 Tahun 1999

dalam program, tema dan materi yang akan diusung dalam kampanye.⁵

Adanya penetapan Pancasila sebagai asas tunggal juga berpengaruh pada tanda gambar partai politik. Terjadi perubahan tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mana pada Pemilu tahun 1982 PPP menggunakan tanda Ka'bah sebagai lambang partai, dalam Pemilu 1987 PPP menggunakan tanda gambar bintang di tengah segi lima. Perubahan tanda gambar juga dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dimana pada Pemilu sebelumnya PDI menggunakan tanda gambar partai berupa banteng dengan latar belakang pohon beringin disertai padi dan kapas pada bagian kiri dan kanan, kemudian pada Pemilu 1987 PDI menggunakan tanda gambar partai berupa gambar banteng tanpa latar belakang beringin, padi dan kapas. Kedua partai politik tersebut tidak dapat menolak ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas yang diusung oleh salah satu peserta Pemilu.

Pada Pemilihan Umum tahun 1977-1997 perolehan suara tertinggi selalu didapatkan oleh Golkar. Jumlah suara mayoritas yang didapatkan Golkar pada setiap pelaksanaan Pemilu mampu menjadikan Golkar sebagai dominasi tunggal dalam kursi parlemen. Kemenangan Golkar dalam Pemilu hanya sampai pada Pemerintahan Orde Baru, karena diawal Reformasi kemenangan Pemilu di dapatkan oleh PDI. PDI mampu mendapatkan suara tertinggi dari 48 partai yang menjadi peserta Pemilu tahun 1999.

B. Pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta Tahun 1971-1999

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia juga ikut mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1971. Berbagai aksi kampanye dilakukan oleh Organisasi Peserta Pemilu di berbagai wilayah di Yogyakarta. Aksi kampanye yang dilakukan para peserta Pemilu berupa rapat umum, pemasangan tanda gambar partai serta menyebarkan selebaran – selebaran, pawai dan arak – arakan kendaraan bermotor. Pada kampanye yang dilakukan peserta Pemilu di Yogyakarta jarang terjadi bentrok fisik maupun tindak kekerasan, dikarenakan orang – orang yang mengganggu aksi kampanye para peserta Pemilu di Yogyakarta akan diadili secara langsung di pengadilan kilat yang sengaja disiapkan agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.⁶

Pada hari pelaksanaan Pemilu pertama Orde Baru hingga pelaksanaan Pemilu akhir masa Orde Baru

suasana berbeda terjadi di Yogyakarta. Jalan – jalan yang menjadi pusat keramaian di Yogya terlihat sepi. Toko – toko yang ada di pasar Brinjarjo juga banyak yang tutup karena ditinggal oleh pemiliknya menggunakan hak pilihnya di TPS masing – masing. Sebanyak 4.507 TPS disediakan oleh Lembaga Pemilu. Pendaftaran Pemilih di TPS dibuka mulai pukul 08.00-14.00.⁷

Kemenangan Pemilu tahun 1971 di Yogyakarta di dapatkan oleh Golkar dengan jumlah suara sebesar 934.055 (68,7%).⁸ Kemenangan Golkar di Yogyakarta pada awal pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru disebabkan oleh para pendukung Golkar yang sebagian besar berasal dari birokrasi dan ABRI.

Pada tanggal 2 Mei 1977 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengikuti pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Peserta Pemilu hanya terdiri dari dua partai dan satu golongan. Jumlah peserta Pemilu yang hanya tiga mampu bertahan hingga Pemilu tahun 1997. Pada pelaksanaan Pemilu selalu diawali dengan aksi kampanye dari masing – masing peserta Pemilu. Aksi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu di Yogyakarta yaitu dengan menggelar rapat tertutup, pengumpulan masa disebuah lapangan hingga sarak – arakan kendaraan atau pawai. Pelaksanaan kampanye di Yogyakarta pada Pemilu tahun 1977-1997 sering menimbulkan beberapa pelanggaran seperti, bentrok fisik antar pendukung yang bisa terjadi tiga kali dalam sehari di beberapa tempat di Yogyakarta.⁹ Pelanggaran lain yang dilakukan para peserta Pemilu ialah pengikutsertaan anak – anak dalam kampanye,¹⁰ pelanggaran lalu lintas hingga pengrusakan kantor cabang partai peserta Pemilu.¹¹

Perolehan suara tertinggi di Yogyakarta mulai Pemilu tahun 1977 hingga Pemilu 1997 didapatkan oleh Golkar. Walaupun jumlah suara Golkar mengalami kenaikan dan penurunan pada Pemilu tahun 1977-1997 di Yogyakarta, namun jumlah suara yang didapatkan Golkar pada Pemilu tahun 1977-1997 cenderung stabil yaitu selalu diatas 55% dari jumlah suara keseluruhan. Dua partai peserta Pemilu lain juga mengalami kenaikan dan penurunan jumlah suara, namun kedua partai peserta Pemilu tidak mampu menyaingi perolehan suara yang didapatkan oleh Golkar, bahkan PDI yang merupakan partai dengan ideologi nasionalis sering mendapatkan suara minoritas di Yogyakarta.

⁷Kedaulatan Rakyat, *Pada Hari Tjeblosan: Djalan, Pasar, Sawah Sepi Mulai Menghitung Disambut Gempa*, (Senin, 5 Juli 1971), hlm. 2

⁸Kedaulatan Rakyat, *Jum'at 16 Juli 1971*

⁹Badan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta: *Catatan Peristiwa/Kejadian Kampanye Pemilu 1992 tanggal 24 Sampai Dengan 30 Mei 1992*

¹⁰Merdeka, *Munculnya Artis Safari Memancing Anak – anak Ikut Kampanye*, (Senin, 12 April 1982), hlm. 8

¹¹Jawa Pos, *Yogyakarta Tegang, Panser Disiapkan PPP Tak Mau Kampanye, Bendera Hijau Tak berkibar*, (Jum'at 2 Mei 1997), hlm. 1

⁵Faisal Ismail. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 206

⁶Kedaulatan Rakyat, *Beberapa Perkara Diadili Peradilan Kilat DIJ*, (Senin, 5 Juli 1971), hlm. 2

Tingginya jumlah suara Golkar pada Pelaksanaan Pemilu tahun 1977-1997 dikarenakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sangat menguntungkan Golkar, seperti adanya aturan bahwa semua Pegawai Negeri harus mendukung Golkar, serta banyaknya pengangkatan terhadap para perangkat desa menjadi pegawai negeri, tujuan pengangkatan para perangkat desa tersebut dimaksudkan agar kepala desa mampu mengarahkan warganya untuk memilih Golkar dalam Pemilihan Umum. Dukungan dari pemimpin Yogyakarta dan keluarga keraton diberikan kepada Golkar melalui aksi kampanye Golkar di Yogyakarta dengan beberapa keluarga keraton yang menjadi juru kampanye seperti GKR Hemas, dan GBPH Joyokusumo, di GBPH H Prabukusumo, Sri Sultan Hamengkubuwana X dan KH Syaiful Mujab.¹² Adanya dukungan dari keluarga keraton menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Golkar karena dengan banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat Yogya dari berbagai kalangan seperti ABRI, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah, dan juga keluarga keraton, maka Golkar mampu mendapatkan suara yang stabil pada setiap pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta.

Pemilu di Yogyakarta dilanjutkan kembali dengan pelaksanaan Pemilu di awal Reformasi yaitu pada tahun 1999. Peserta Pemilu tahun 1999 mencapai 48 partai politik. Pelaksanaan Pemilu diawali dengan aksi kampanye dari masing – masing partai politik. Banyaknya jumlah peserta Pemilu yang ikut melaksanakan kampanye semakin menambah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Pelanggaran yang sering terjadi pada Pemilu tahun 1999 adalah terjadinya *money politics* atau politik uang.

“.....Politik uang bisa terjadi bila ada penggunaan uang, langsung atau tidak langsung, yang bertujuan untuk membelokkan keinginan atau aspirasi masyarakat untuk partainya. Sasarannya biasanya masyarakat yang kebetulan karena krisis moneter ini amat menderita dan membutuhkan uang. Apabila ada pembagian uang mereka merasa memperoleh perhatian.....”¹³

Dengan adanya sistem politik uang yang terjadi pada Pemilu 1999 menunjukkan betapa suara masyarakat dapat dibeli dengan uang tanpa memikirkan kehidupan bangsa dan negara kedepannya. Suatu partai jika partai memenangkan Pemilu dengan cara curang, maka partai tersebut akan membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi partainya sendiri, dan tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah memberikan suara. Hingga saat ini politik uang pada setiap Pemilu yang terjadi di Indonesia sulit untuk dihilangkan, hal ini terjadi karena pemerintah belum menunjukkan adanya tindakan nyata dalam mencegah terjadinya *money politics*.

¹²Kedaulatan rakyat, *Jadwal Hari Ini: daerah Istimewa Yogyakarta*, (Selasa, 2 Mei 1992), hlm. 1

¹³ Kedaulatan Rakyat, *Politik Uang Dalam Pemilu*, (Jum;at 7 Mei 1999), hlm. 6

Para elit politik dari berbagai partai banyak mengkritik adanya politik uang pada pelaksanaan Pemilu, namun kenyataannya mereka juga melakukan hal yang sama demi memperoleh suara dan memenangkan Pemilu.

C. Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu di Yogyakarta Tahun 1971-1999

Elektabilitas adalah ukuran atau tingkat keterpilihan suatu partai dalam pelaksanaan Pemilu. Tingkat keterpilihan yang dimaksud adalah, sejauh mana sebuah partai dapat dipilih rakyat pada Pemilihan Umum. Hal ini mampu berpengaruh terhadap keberhasilan partai untuk memperoleh suara tertinggi pada Pemilu. Perubahan elektabilitas merupakan perubahan tingkat keterpilihan peserta Pemilu, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan jumlah suara tertinggi yang diperoleh partai pada pelaksanaan Pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta perubahan jumlah suara partai terjadi antara Golkar dan PDI.

Pada Pemilu masa Orde Baru di Yogyakarta Golkar selalu mengalami keberhasilan dalam mendapatkan suara mayoritas. Tingginya jumlah suara yang diperoleh Golkar pada setiap pelaksanaan kampanye di Yogyakarta disebabkan oleh strategi politik Golkar.. Golkar memiliki tiga jalur dalam mengartikulasikan strategi politiknya. Tiga jalur tersebut yaitu, jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi), dan Jalur G (Golkar). Tiga jalur ini merupakan kekuatan inti dari Golkar. Pegawai Negeri sebagai aparat birokrasi dengan sendirinya masuk dalam dalam barisan jalur B (birokrasi). Dengan demikian Pegawai Negeri dibebani tuntutan moral dan tuntutan politis yang mengharuskan mereka mengembangkan loyalitas tunggal. Pegawai Negeri yang tergabung dalam Korpri bukan hanya sebagai pemilih saja, namun Korpri juga dikerahkan untuk menggandeng pemberi suara agar mau berpaling ke Golkar. Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang bertindak sebagai petugas pelaksana pemilu sebagian besar berasal dari unsur pemerintah.¹⁴

Kesuksesan Golkar di Yogyakarta mendapat dukungan penuh oleh pemimpin dan seluruh keluarga keraton Yogyakarta, dengan menggunakan simbol utama keluarga keraton dan pemimpin Yogyakarta maka Golkar dapat dengan mudah menarik simpati rakyat Yogya agar mendukung Golkar, karena masyarakat Yogyakarta masih menerapkan sistem paternalisme. Selain itu kepercayaan masyarakat Yogyakarta tentang sabda pandita ratu atau apa yang dikatakan raja adalah hukum yang mengikat menjadi sebuah kemudahan bagi Golkar untuk mendapatkan suara mayoritas di Yogyakarta.

Perubahan jumlah suara pada Golkar mulai terjadi pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999. Kegagalan pemerintahan Orde Baru membuat Golkar tidak lagi mampu memonopoli kekuasaan. Segala kebijakan yang menguntungkan Golkar dibawah kepemimpinan B.J Habibie dihapuskan dan partai – partai lain yang

¹⁴Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 37-38

diberlakukan tidak adil pada Orde Baru diberikan perlakuan yang sama oleh Presiden dengan mengeluarkan kebijakan baru terhadap partai politik. Kebijakan – kebijakan yang diberikan presiden B.J Habibie adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan PPP dan PDI kedalam kabinet Reformasi yang dibentuk oleh Habibie
- b. Tidak melarang berdirinya partai politik baru sehingga dalam waktu 8 bulan kepemimpinan Habibie, mampu memunculkan 141 partai baru yang telah terbentuk
- c. Melepaskan pimpinan partai politik yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah (dari tahanan)
- d. Mendesak Golongan Karya untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk menjauhkan Golkar dari para pemimpin yang dianggap setia kepada Soeharto
- e. Mendorong lahirnya partai yang bernafaskan Islam, seperti partai Keadilan dan Partan Bulan Bintang
- f. Mengkonstruksikan ABRI untuk bersikap netral
- g. Melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota atau pengurus partai politik

Mengajukan undang – undang yang yang dapat mempermudah prosedur pendirian partai, sistem multi partai dikembangkan, keuangan partai di atur lebih rinci, asas partai dibebaskan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, kewenangan presiden untuk membubarkan dan membekukan partai dihilangkan dan partai dapat didirikan sampai ke tingkat desa/kelurahan.¹⁵

Kondisi yang terjadi pada Golkar berbanding terbalik dengan kondisi PDI. Tampilnya Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh Reformasi dari PDI semakin menunjukkan pada rakyat Indonesia bahwa PDI merupakan partai yang tidak mendukung kepemimpinan Soeharto yang merugikan rakyat. Lemahnya kondisi Golkar dan berkurangnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dimanfaatkan PDI untuk mengumpulkan suara menjelang Pemilu 1999. Kesuksesan PDI dalam meraup suara massa dengan menggunakan isu kegagalan pemerintahan Orde Baru pada pelaksanaan kampanye semakin membuka jalan kemenangan bagi PDI pada Pemilu tahun 1999. Selain itu PDI Perjuangan pimpinan Megawati mampu menggalang prekurban masa pendukung tanpa membedakan golongan baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, karena tujuan utama PDI adalah menuju negara yang demokratis.

Dukungan masyarakat Yogyakarta kepada PDI sudah diberikan sejak Pemilu tahun 1987 yang menunjukkan kenaikan jumlah suara PDI dari Pemilu sebelumnya. Nenaikan jumlah suara PDI di Yogyakarta

berlanjut hingga pelaksanaan Pemilu tahun 1992. Walaupun PDI tidak mendapatkan massa dukungan di desa – desa yang ada di Yogyakarta, tetapi PDI mampu mendapatkan dukungan dari para mahasiswa di Yogyakarta yang tidak sejalan dengan pemerintahan Orde Baru. Para mahasiswa memilih untuk mendukung PDI karena adanya kebijakan NKK/BKK yang membuat terbatasnya ruang gerak mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya sebagai seorang aktivis kampus, sehingga para mahasiswa banyak yang memilih untuk masuk sebagai pendukung salah satu partai. PDI juga merasa terbantu oleh dukungan para aktivis muda yang dapat mengobarkan semangat demokrasi kaum muda lainnya.

Dibawah kepemimpinan Soerjadi PDI mampu mengubah citranya dari partai gurem menjadi partai wong cilik. Perubahan predikat PDI merupakan salah satu keberhasilan dari strategi kampanye Soerjadi, selain itu PDI juga berhasil menyusup dibalik kegelisahan warga PPP akibat aksi penggebosan oleh sebagian tokoh – tokoh NU dan kawan – kawan. Gaya PDI dalam menarik simpati massa dalam setiap kampanye menjadi sebuah pertimbangan PDI untuk tetap dipimpin seorang yang cakap dan lincah seperti Soerjadi. Keberhasilan PDI pada Pemilu tahun 1987 dan 1992 sesungguhnya lebih banyak mengandalkan kemampuan menghidupkan kembali pemikiran – pemikiran Soekarno sebagai tokoh revolusi di Indonesia. Dengan tema – tema kampanye yang banyak mengangkat sosok Soekarno, maka secara perlahan rakyat Indonesia akan kembali pada keberhasilan Soekarno membangun pemerintahan di Indonesia.¹⁶

Adanya dukungan para mahasiswa dan aktivis kampus yang ada di Yogyakarta, maka setiap pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan PDI di Yogyakarta selalu di padati oleh kaum muda. Visi dan misi PDI pada pelaksanaan kampanye dapat diterima oleh pendukungnya, bahkan tema – tema yang diusung pada kampanye dalam menyoroti pemerintah selalu ditanggapi baik oleh para mahasiswa pendukung PDI. Namun konflik PDI yang terjadi menjelang Pemilu tahun 1997 juga berpengaruh terhadap kondisi PDI di Yogyakarta. Terjadinya dualisme kepemimpinan antara Soerjadi dan Megawati membuat perpecahan di tubuh PDI, sehingga pelaksanaan kampanye PDI di Yogyakarta tidak begitu meriah, dan perolehan suara PDI di Yogyakarta pada Pemilu tahun 1997 juga menurun drastis. PDI hanya mampu mendapatkan suara sebesar 3,5% saja, jumlah suara yang sangat buruk selama menjadi peserta Pemilu di masa Orde Baru.

Perubahan elektabilitas antara PDI dan Golkar di Yogyakarta terjadi pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999. Perubahan tersebut dibuktikan dari perubahan suara yang terjadi antara PDI dan Golkar. Golkar pada setiap pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta pada masa Orde Baru selalu menjadi mayoritas dengan perolehan suara diatas 50%, mampu dikalahkan oleh PDI yang selalu

¹⁵Selo Sumardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 323

¹⁶ Bambang Cipto, *Duel Segitiga PPP, Golkar, PDI Dalam Pemilu Tahun 1997*, (Yogyakarta: Titian Iliahi Press), hlm. 129-131

mendapatkan suara minoritas pada Pemilu masa Orde Baru. Perubahan elektabilitas yang terjadi pada Golkar dan PDI disebabkan oleh kegagalan pemerintahan Orde Baru, yang kemudian digantikan oleh Orde Reformasi dengan merubah segala sistem dan kebijakan yang dapat merugikan pemerintahan masa Reformasi. Kegagalan Golkar pada Pemilu tahun 1999 juga disebabkan oleh hilangnya dukungan dari Pegawai Negeri dan juga ABRI terhadap Golkar. Sementara PDI mampu menjadi unggul pada Pemilu tahun 1999 dikarenakan banyaknya pendukung Golkar yang beralih kepada PDI dan partai – partai lain pada peserta Pemilu tahun 1999. PDI juga memiliki seorang tokoh yang menjadi salah satu pendukung terwujudnya Reformasi dan PDI juga mendapatkan kembali dukungan dari para pendukung PNI yang pada masa Orde Baru tepecah suaranya.

PENUTUP

Simpulan

Pemilu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai negara demokratis. Pemilu juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan mewakili pikiran rakyat dalam pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia mulai diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali yaitu pada pemerintahan Orde Baru. Pada pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru jumlah peserta Pemilu hanya dibatasi 3 peserta yang terdiri dari dua partai dan satu golongan. Sedikitnya jumlah peserta Pemilu pada masa Orde Baru disebabkan oleh adanya fusi atau penggabungan partai berdasarkan atas ideology yang diusung oleh masing – masing partai. Pada pemilu tahun 1999 fusi bagi partai tidak diberlakukan lagi, sehingga jumlah peserta Pemilu pada tahun 1999 mencapai 48 partai politik

Pelaksanaan Pemilu juga diselenggarakan di Yogyakarta, sebagai salah satu Daerah Istimewa yang menerapkan budaya Jawa Yogyakarta juga ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 1971-1999. Pada pelaksanaan Pemilu di Yogyakarta selalu diawali dengan berbagai aksi kampanye yang diselenggarakan oleh masing – masing peserta Pemilu. Aksi kampanye yang diselenggarakan di Yogyakarta menimbulkan beberapa pelanggaran, namun pada hari pemungutan suara Di Yogya selalu berjalan dengan tertib dan aman. Perolehan suara di Yogyakarta selalu di dominasi oleh Golkar. Dua partai Peserta Pemilu di Yogyakarta hanya mampu mendapatkan suara rendah dan tidak mampu menyaingi suara Golkar. Kemenangan Golkar pada Pemilu hanya bertahan hingga Pemilu tahun 1997, karena pada pemilu tahun 1999 kemenangan dalam mendapatkan perolehan suara tertinggi menjadi milik PDI.

Terjadinya perubahan jumlah suara antara Golkar dan PDI pada Pemilu tahun 1999 menunjukkan adanya perubahan elektabilitas diantara kedua partai. Perubahan elektabilitas antara PDI dan Golkar terjadi karena adanya penghapusan kebijakan yang dilakukan Presiden B.J Habibie yang hanya menguntungkan Golkar, dan mengganti kebijakan baru yang lebih adil

bagi partai politik lain, sehingga tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan.

Saran

Penulisan skripsi tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Yogyakarta hingga menyebabkan terjadinya perubahan elektabilitas pada partai peserta Pemilu pada masa Orde Baru hingga Reformasi dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan Pemilu dan kondisi politik pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Presiden Habibie. Dengan mempelajari tentang Pemilu pada masa lalu, maka diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu agar dapat dilaksanakan lebih sempurna sesuai dengan asas Pemilu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pengetahuan tentang Pemilu juga dapat diberikan ditingkat sekolah pada pembelajaran yang membahas tentang sejarah Indonesia di masa Orde Baru hingga Reformasi pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan dan sederajat. Pengetahuan tentang Pemilu bagi siswa – siswi SMA/SMK juga dapat dijadikan sebagai informasi bagi para siswa – siswi yang terdaftar sebagai pemilih pemula, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan mengurangi tingkat Golput yang menjadi pilihan rakyat Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto, Bambang.. 1997. *Duel Segitiga PPP, Golkar, PDI Dalam Pemilu Tahun 1997*. Yogyakarta: Titian Iliahi Press
- Donald, Parulian Donald. 1997. *Menggugat Pemilu*.. Jakarta: PustakaSinarHarapan.
- Ismail, Faisal.1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan pncasila*.Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya :Unesa University Press.
- Lutfi, Ahmad Nashihd kk. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional.
- Sumardjan, Selo. 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: GramediaPustakaUtama.

Arsip

Undang – undang no. 15 Tahun 1969

Undang – undang No. 3 Tahun 1999

Badan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta: Catatan
Peristiwa/Kejadian Kampanye Pemilu 1992
tanggal 24 Sampai Dengan 30 Mei 1992

SURAT KABAR

Kedaulatan Rakyat, *Beberapa Perkara Diadili Peradilan
Kilat DIJ*, (Senin, 5 Juli 1971)

Kedaulatan Rakyat, *Pada Hari Tjoblosan: Djalan, Pasar,
Sawah Sepi Mulai Menghitung Disambut Gempa*,
(Senin, 5 Juli 1971)

Kedaulatan Rakyat, *Hasil Pemilu Di DIY Dan PPD
Tingkat I* (Jum'at 16 Juli 1971)

Merdeka, *Munculnya Artis Safari Memancing Anak –
anak Ikut Kampanye*, (Senin, 12 April 1982)

Kedaulatan rakyat, *Jadwal Hari Ini: daerah
Istimewa Yogyakarta*, (Selasa, 2 Mei 1992)

Kedaulatan Rakyat, *Politik Uang Dalam Pemilu*, (Jum;at
7 Mei 1999)

Jawa Pos, *Yogyakarta Tegang, Panser Disiagakan PPP
Tak Mau Kampanye, Bendera Hijau Tak berkibar*,
(Jum'at 2 mei 1997)

